

Pengurusan Izin Olah Gerak Kapal MT. Ship Trinity Dari Area Dock ke Area Labuh pada PT. Multi Jaya Samudera Belawan

Richa Anjelina^{1*}, Netty Kesuma², Fadiyah Hani Sabila³

¹⁻³ Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

Korespondensi penulis: richa.anjelina05@gmail.com*

Abstract. *This study focuses on the process of managing the Ship Movement Permit for MT.SHIP TRINITY during its transfer from the dock area to the anchorage area at PT. Multi Jaya Samudera Belawan. As an intermediary company, PT. Multi Jaya Samudera Belawan is committed to finding cargo ships with high-quality standards to provide the best service to customers, while prioritizing safety and maritime environmental protection. In its capacity as a shipping company, PT. Multi Jaya Samudera handles ship movement permit management through several stages, including administrative compliance, permit application, and ship document completion. This process needs to be carried out quickly and accurately to avoid delays, which requires good coordination with various related agencies at the port. The role of PT. Multi Jaya Samudera Belawan is crucial in supporting ship service activities in the shipping industry. To optimize port operations, appropriate management policies are needed to improve the overall effectiveness and efficiency of port performance.*

Keywords: *Management, Permit, Manoeuvre*

Abstract. Kajian ini berfokus pada proses pengurusan Izin Olah Gerak Kapal MT.SHIP TRINITY dalam perpindahannya dari area dok menuju area labuh di PT. Multi Jaya Samudera Belawan. Sebagai perusahaan perantara, PT. Multi Jaya Samudera Belawan berkomitmen mencari muatan kapal dengan standar kualitas tinggi untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, sambil mengutamakan keselamatan dan perlindungan lingkungan maritim. Dalam kapasitasnya sebagai perusahaan pelayaran, PT. Multi Jaya Samudera menangani pengurusan izin olah gerak kapal melalui beberapa tahap, meliputi pemenuhan administrasi, pengajuan permohonan, dan pelengkapan dokumen kapal. Proses ini perlu dilaksanakan dengan cepat dan akurat untuk menghindari keterlambatan, yang membutuhkan koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait di pelabuhan. Peran PT. Multi Jaya Samudera Belawan sangat krusial dalam mendukung aktivitas pelayaran kapal di industri pelayaran. Untuk mengoptimalkan operasional pelabuhan, diperlukan kebijakan manajemen yang tepat guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pelabuhan secara keseluruhan.

Kata kunci : Pengurusan, Surat Izin, Olah gerak

1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan semakin banyaknya arus perdagangan, baik lokal, nasional dan internasional melalui Transportasi laut maka semakin meningkat perusahaan pelayaran yang memanfaatkan armada-armada laut. Hal ini dikarenakan *Freight* yang murah dan daya angkut lebih banyak dibandingkan dengan Transportasi lain.

Dalam suatu negara maritim, peranan pelayaran sangat penting dalam perkembangan industri perekonomian Oleh sebab itu pengusahaan kapal niaga yang dioperasikan perusahaan-perusahaan selaku pemilik kapal menjangkau jarak yang jauh dan luas. Maskapai pelayaran atau disebut juga perusahaan pelayaran niaga yang bergerak dalam lapangan pengangkutan muatan melalui air yaitu dengan menggunakan alat pengangkut seperti jenis-jenis kapal yang sesuai dengan jenis dan kebutuhan konsumen.

Kapal laut merupakan sarana transportasi yang baik dan efisien karena mampu banyak mengangkut muatan sehingga semakin banyak pengadaan kapal laut maka sangat berpengaruh terhadap *Freight* (uang tambang) yang di dapat. *Freight* (uang tambang) merupakan imbalan yang dibayarkan oleh pemilik muatan kepada pihak pengangkut untuk pengangkutan barang melalui laut. Besarnya tarif yang dibayarkan tergantung kepada jenis, berat, atau volume barang yang diangkut.

Telah diketahui bahwa negara Republik Indonesia disebut juga salah satu negara maritim. Wilayah Indonesia terdiri dari dua pertiga lautan dan sepertiga daratan, sedangkan daratannya terdiri dari beribu-ribu pulau terbentang dari Sabang sampai Marauke, dari Miangas sampai pulau Rote.

Dalam pengurusan sertifikat tersebut juga memiliki persyaratan dan harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Permasalahan kurang sadarnya *Owner* kapal dalam melengkapi kapalnya dengan peralatan yang memenuhi standar dan kurang profesional petugas terkait dalam melayani agen kapal, Pengurusan dokumen tersebut merupakan tugas dari seorang agen kapal.

PT. Multi Jaya Samudera Belawan Adalah sebuah perusahaan pelayaran yang bergerak dibidang angkutan laut dan disamping itu melayani kapal milik dan kapal-kapal lain untuk diageni, dengan trayek *liner* dan *tramper*. Sebagai perusahaan pelayaran yang bergerak dibidang keagenan kapal, keberhasilan perusahaan tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan bidang operasional yang harus bekerja semaksimal mungkin dengan tujuan untuk tetap membangun kerja sama yang baik kepada pihak pengguna jasa. Keberhasilan dari kerja sama tersebut tentu akan menghasilkan pemasukan yang besar untuk perusahaan.

Melihat tata kerja atau peranan dari bagian keagenan yang memegang peranan penting dalam perusahaan pelayaran dan dalam Pengurusan Izin Olah Gerak Kapal MT. Ship Trinity Dari Area *Dock* Ke Area Labuh Pada PT. Multi Jaya Samudera Belawan. Adapun masalah yang sering dihadapi oleh operasional yaitu kurangnya komunikasi antara pihak kapal dengan pihak operasional sehingga mengakibatkan terhambatnya pengurusan izin pergerakan kapal ke pihak instansi pemerintah, dan kendala di sitem sehingga surat izin yg dikeluarkan terlambat. Maka penulis merasa tertarik dan mencoba mendalami serta mempelajari sejauh mana aktifitas keagenan dalam menangani Pengurusan izin Kapal MT. Ship Trinity Dari Area *Dock* Ke Area Labuh Oleh PT. Multi Jaya Samudera Belawan. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pengurusan Izin Olah Gerak Kapal MT. Ship Trinity Dari Area *Dock* Ke Area Labuh Pada PT. Multi Jaya Samudera Belawan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pengurusan

Berdasarkan ketentuan PP No. 94 tahun 1999 dalam kamus hukum Indonesia, pengurusan didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas yang dijalankan perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengurusan merupakan serangkaian proses dan tindakan dalam mengatur serta mengelola berbagai urusan dengan disertai tanggung jawab penuh.

Pengertian Izin Olah gerak kapal

Satria (2022) mendefinisikan surat izin olah gerak kapal sebagai dokumen resmi yang diterbitkan Syahbandar, yang berfungsi sebagai izin pergerakan kapal di wilayah pelabuhan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Subar (2020) menambahkan bahwa olah gerak kapal merupakan kemampuan mengendalikan kapal, baik saat diam maupun bergerak, menggunakan berbagai peralatan seperti mesin dan kemudi untuk mencapai tujuan pelayaran secara efisien. PT. Multi Jaya Samudera Belawan secara umum menangani pengurusan surat izin olah gerak untuk kapal Motor Tanker (MT) dengan dua jenis kegiatan utama:

- a) Layanan assist (penundaan) kapal motor sesuai permintaan pelanggan. Kegiatan ini meliputi proses penyandaran atau pelepasan kapal dari area sandar dengan tujuan mencegah terjadinya tabrakan atau benturan dengan dermaga dan kapal-kapal di sekitarnya.
- b) Penerbitan surat izin olah gerak untuk keperluan standby, yang mencakup perpindahan kapal dari area dok ke lokasi berlabuh atau perpindahan antar dermaga.

Pengertian Kapal

Menurut Sandy (2021) Kapal merupakan sarana pengangkut penumpang atau barang yang ada dilaut, sungai dan sebagainya yang digerakkan menggunakan tenaga manusia, mesin atau angin. Sementara itu Prasetiawan (2022) Kapal adalah kendaraan air yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda

Pengertian *Docking* atau *dock* kapal

Terkait fasilitas dok, Saputra (2020) menjelaskan bahwa docking atau dock kapal adalah kolam besar di tepi laut yang umumnya dimiliki galangan kapal, minimal satu fasilitas graving dock untuk keperluan perbaikan dan pembangunan kapal baru. Arditiya (2023) memperluas definisi tersebut dengan menjelaskan dock sebagai area perairan yang berfungsi untuk pembangunan kapal baru (new building), perbaikan (ship repair), dan pemeliharaan (maintenance) kapal.

Area Labuh

Menurut Mahendra dan Saputro (2021), area labuh didefinisikan sebagai kawasan perairan khusus yang diperuntukkan untuk berbagai kegiatan maritim, termasuk berlabuh, lay up, menunggu muatan, alih muat antar kapal, tank cleaning, blending, bunker, perbaikan ringan, serta aktivitas pelayaran lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data selama 6 bulan melalui observasi langsung. Penulis terlibat secara aktif dalam proses Pengurusan Izin Olah Gerak Kapal MT.Ship Trinity dari area dock ke area labuh di PT.Multi Jaya Samudera, sambil melakukan pencatatan terhadap berbagai aspek yang diamati. Selain observasi, penulis melakukan wawancara dan diskusi dengan staf Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Utama Pelabuhan Belawan, khususnya terkait kendala sistem yang menyebabkan keterlambatan penerbitan surat izin. Dari wawancara tersebut, terungkap bahwa keterlambatan disebabkan oleh permasalahan jaringan di pusat dan tingginya volume pengajuan izin pergerakan dari berbagai perusahaan.

Metode Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Penelitian juga didukung dengan metode kepustakaan (*Library Research*), yang meliputi:

- a) Studi literatur dari buku-buku yang relevan dengan topik penelitian
- b) Konsultasi dengan senior di wilayah Belawan
- c) Pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan di POLTEK AMI Medan, baik dalam bentuk materi tertulis maupun presentasi lisan dari para dosen

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengurusan Izin Olah Gerak Kapal MT. Ship Trinity Dari Area Dock Ke Area Labuh.

Olah gerak kapal merupakan serangkaian aktivitas yang melibatkan pergerakan kapal baik secara aktif maupun pasif di wilayah laut atau pelabuhan dengan mengutamakan keamanan dan efisiensi. Kemampuan ini memungkinkan kapal berpindah posisi dalam lingkungan pelabuhan, terutama untuk keperluan bongkar muat barang serta perbaikan di dermaga atau dok.

Menurut Satria (2022) Surat Izin Olah Gerak adalah dokumen resmi yang dikeluarkan Syahbandar sebagai izin kapal untuk bergerak di perairan Belawan. Dokumen ini diberikan

setelah kapal memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pengurusannya dilakukan berdasarkan permintaan pelanggan untuk berbagai keperluan, seperti penyandaran atau keberangkatan kapal dari dermaga. Izin ini juga berfungsi sebagai upaya pencegahan tabrakan dengan dermaga atau kapal lain di sekitarnya.

PT. Multi Jaya Samudera Belawan umumnya menangani pengurusan izin olah gerak untuk kapal Motor Tanker (MT). Surat izin ini diperlukan untuk berbagai aktivitas kapal, termasuk kondisi siaga (standby), perpindahan dari dok ke tempat berlabuh, serta pergerakan antar dermaga.

Tata Cara Penginputan Izin Olah Gerak Kapal di Sistem Inapornet

Widyaningrum (2020) menjelaskan bahwa Sistem Inapornet adalah platform layanan terpadu berbasis internet yang mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan standar. Sistem ini berfungsi untuk mengelola layanan kapal dan barang dari berbagai pemangku kepentingan dan instansi terkait di pelabuhan. Tahapan-tahapan yang ada sistem Inapornet :

1. Membuka situs website sistem inapornet
2. *Login username dan password*
3. Menu layanan
4. Klik SPOG (Surat Persetujuan Olah Gerak)
5. Pernohonan SPOG dengan pandu
6. Masukkan data Nomor SPM (surat persetujuan masuk)
7. Data nomor PKK (Persetujuan Kedatangan Kapal)
8. Data nomor SPK Pandu
9. Data nomor RPK
10. Data Pelabuhan
11. Data tanda pendaftaran kapal
12. Data nama kapal
13. Data nama nahkoda
14. Data perusahaan pelayaran
15. Data waktu register
16. Data lokasi awal dan akhir
17. Data nama petugas pandu
18. Data jenis pandu
19. Data kegiatan
20. Data keperluan

21. Data waktu gerak (Sutria, 2022).

Setelah itu pihak syahbandar mengecek kelengkapan data yang di input di Sistem Inapornet, setelah data lengkap dan memenuhi persyaratan pihak syahbandar menyetujui di Sistem Inapornet dan kemudian terbitlah surat izin olah gerak kapal.

Dokumen Yang Dibutuhkan Untuk Pengurusan Izin Olah Gerak Kapal

Dalam proses pengurusan izin olah gerak kapal, agen perlu menyiapkan sejumlah dokumen untuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, yang meliputi:

1. Surat Permohonan Olah Gerak Kapal

Dokumen yang diajukan kepada kepala bidang kesyahbandaran dengan informasi lengkap mencakup:

- Identitas kapal (nama)
- Data nahkoda dan jumlah kru
- Kapasitas berat kotor
- Bendera kapal
- Pelabuhan asal
- Lokasi kapal saat ini
- Rencana pergerakan
- Nomor registrasi syahbandar
- Jadwal pergerakan

2. Dokumen Pendukung:

- Salinan Pernyataan Umum Kapal (PUK) yang memuat data kapal dari Kantor Pelabuhan
- Last Port Clearance: bukti izin pergerakan terakhir kapal
- Surat Pernyataan Nahkoda (Master Sailing Declaration) yang ditandatangani dan distempel, berisi informasi kapal, awak, dan muatan
- Salinan Memorandum yang mencantumkan daftar dan masa berlaku dokumen kapal
- Crew list yang memuat daftar lengkap awak kapal beserta jabatan
- Salinan Surat Penunjukan Keagenan dari pemilik kapal
- Surat Persetujuan Masuk Kapal (SPM) yang disetujui melalui sistem Inapornet
- SPK Pandu: surat perintah kerja dari Badan Usaha Pelabuhan untuk petugas pandu

Setiap dokumen memiliki fungsi spesifik dalam memastikan legalitas dan kelancaran operasional kapal di pelabuhan.

Instansi-Instansi Yang Berhubungan Dalam Pengurusan Izin Olah Gerak Kapal

1. Kantor KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan) Belawan

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 56 menetapkan Syahbandar sebagai pejabat pemerintah di pelabuhan yang ditunjuk menteri untuk memegang otoritas tertinggi dalam pengawasan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan dan keamanan pelayaran. Syahbandar juga berperan dalam penerbitan Port Clearance, izin olah gerak kapal, serta pemeriksaan dokumen kapal untuk memastikan kelayakan dan pemenuhan standar keselamatan pelayaran.

2. PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo)

PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) merupakan BUMN yang berfokus pada sektor logistik, khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Di bawah naungan Pelindo, terdapat unit Kepanduan yang bertugas memberikan panduan alur pelayaran dan mencegah tabrakan dengan batu karang atau pipa bawah laut. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan no. 24 KM tahun 2002 tentang penyelenggaraan pemanduan, Bab I Pasal I ayat I, pemanduan didefinisikan sebagai aktivitas pendampingan nahkoda kapal untuk memastikan navigasi berjalan aman, tertib, dan lancar dengan memberikan informasi kondisi perairan setempat. Pandu sendiri adalah pelaut berkualifikasi nautika yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pemanduan kapal.

3. Surat Permohonan Pandu Kapal

Dalam pengajuan permohonan kepada kepala seksi pemandu dan penundaan kapal, diperlukan informasi detail kapal yang mencakup:

- a. Identitas kapal (nama)
- b. Asal negara (bendera)
- c. Kapasitas berat kotor
- d. Dimensi kapal (panjang, lebar, kedalaman)
- e. Waktu kedatangan
- f. Draft saat masuk (bagian depan dan belakang)
- g. Informasi pemandu masuk
- h. Draft saat keluar (bagian depan dan belakang)
- i. Informasi pemandu keluar

Dalam pelaksanaan pemanduan, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Kewajiban menggunakan jasa pemanduan berlaku bagi kapal dengan berat kotor minimal 500 GT (Grosse Tonnage) yang beroperasi di perairan wajib pandu.
- b. Layanan pemanduan dapat diberikan kepada kapal di bawah 500 GT yang berlayar di perairan wajib pandu luar biasa, dengan pertimbangan keselamatan pelayaran dan atas permintaan Nahkoda.
- c. Pelayanan pemanduan di area wajib pandu tersedia selama 24 jam penuh.

4. Kantor Kesehatan Pelabuhan

Menurut Sutria (2022), Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) beroperasi sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kesehatan, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pencegahan Penyakit dan Penyehatan (Ditjen P2P). KKP memiliki peran strategis dalam mencegah penyebaran penyakit karantina dan potensi wabah melalui jalur pelabuhan, dengan tetap memperhatikan kelancaran aktivitas perjalanan dan perdagangan.

Dokumen-dokumen kapal yang dibutuhkan untuk izin olah gerak kapal

1. *Ship's Registry (Certificate Of National)*

Ship's Registry (Certificate Of National) adalah sertifikat tanda kebangsaan atinya kapal tersebut berhak mengibarkan bendera dari negara dan berhak atas perlindungan hukum tertentu dinegara tersebut.

2. *Tonnage certificate (Surat Ukur)*

Tonnage certificate (Surat Ukur) adalah keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada bagian pengukuran mengenai ukuran kapal.

3. *Safety radio certificate*

Safety radio certificate adalah surat keterangan bahwa kapal tersebut mempunyai penerima dan pemancar radio dalam keadaan tertentu.

4. *Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (Cargo Ship Safety Equipment Certificate)*

Adalah sertifikat yang menegaskan dan menjelaskan perlengkapan dan peralatan kapal.

5. *Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang (Cargo Ship Safety Construction Certificate)*

Adalah surat keterangan yang menunjukkan bahwa kabin dan bangunan kapal muatan menurut jenis kapalnya telah memenuhi standar dan keselamatan kapal.

6. *Ship Sanitation Control Examtion Certificate (SSCEC)*

Ship Sanitation Control Examtion Certificate (SSCEC) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa kapal tersebut terbebas dari wabah penyakit SSCEC ini berlaku selama 6 (enam) bulan setelah sertifikat ini berakhir maka harus dilakukan perpanjangan Kembali.

7. *Buku Kesehatan (Health Book)*

Buku Kesehatan (*Health Book*) adalah pernyataan bahwa ABK bebas dari wabah penyakit buku ini dikeluarkan oleh dinas Kesehatan Pelabuhan setiap tanggal berangkat.

8. *Sertifikat Kelas Lambung (Hull Classification Certificate)*

Sertifikat Kelas Lambung (*Hull Classification Certificate*) adalah dokumen yang mencantumkan klasifikasi kapal serta jenis kapal.

9. *Sertifikat Kelas Mesin (Machinery Classification Certificate)*

Sertifikat Kelas Mesin (*Machinery Classification Certificate*) adalah dokumen yang mencantumkan klasifikasi kapal serta mesin kapal.

10. *RPT (Rencana Pola Trayek)*

RPT (Rencana Pola Trayek) adalah sertifikat yang berisi tentang Pelabuhan -pelabuhan yang dapat disinggahi dan muatan – muatan yang dapat dimuat

11. *Daftar Anak Buah Kapal (Crew List)*

Daftar Anak Buah Kapal (*Crew List*) adalah data-data yang berisi anak buah kapal, seperti nama ABK, tanggal lahir , tanggal expired buku pelaut, Jabatan, Jenis kelamin, No PKL, No buku pelaut (Sutria, 2022).

Hambatan-Hambatan yang dihadapi pada saat izin olah gerak kapal

Dalam proses pengurusan izin olah gerak kapal, PT. Multi Jaya Samudera Belawan menghadapi berbagai tantangan operasional karena melibatkan multiple instansi dan lokasi. Beberapa kendala utama yang dihadapi meliputi:

- a. Ketidakefektifan komunikasi, terutama dalam penyampaian informasi mendadak terkait pergerakan kapal.
- b. Proses persetujuan sistem yang terhambat dari pihak syahbandar.
- c. Hambatan fisik berupa kapal-kapal yang bersandar di pinggir dok, yang mengakibatkan tertundanya pergerakan kapal dari dok ke area labuh.
- d. Permasalahan teknis berupa sistem yang sering mengalami error, menyebabkan proses input data harus diulang berkali-kali.

- e. Keterlambatan dalam pengumpulan data dari pihak kapal yang diminta oleh tim operasional.
- f. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi cuaca juga memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran operasional dan pergerakan kapal.

Penyelesaian Masalah Pada Saat Pengurusan Izin Olah Gerak

Untuk meminimalisir dan mengatasi berbagai kendala yang sering muncul, beberapa solusi dapat diterapkan:

- a. Mengutamakan penyelesaian tugas segera setelah menerima informasi mendadak tentang aktivitas kapal, dengan mengedepankan kolaborasi antar karyawan untuk memastikan penyelesaian pekerjaan secara efisien.
- b. Meningkatkan komunikasi dengan pihak syahbandar untuk mempercepat proses persetujuan sistem, sehingga memperlancar penyelesaian pekerjaan.
- c. Membangun koordinasi yang solid antara karyawan dan tim operasional untuk memastikan kelancaran setiap kegiatan melalui kerja sama yang baik.
- d. Melakukan pemantauan berkala terhadap jaringan sistem layanan oleh instansi atau petugas terkait untuk mencegah gangguan teknis.
- e. Mengoptimalkan komunikasi antara tim operasional dan pihak kapal untuk mempercepat proses pengumpulan data yang dibutuhkan, sehingga meningkatkan efisiensi pekerjaan.
- f. Menerapkan prinsip kecepatan dan ketepatan dalam setiap aktivitas untuk menghindari keterlambatan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengurusan Izin Olah Gerak Kapal MT. Ship Trinity Dari Area Dock ke Area Labuh pada PT. Multi Jaya Samudera Belawan terlaksanakan dengan baik sesuai prosedur yang ada akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang sering terjadi seperti keterlambatan pihak kapal melengkapi data – data yang diminta pihak operasional sehingga pengurusan izin olah gerak kapal tidak berjalan dengan baik dan efisien.

Saran

Agar Pengurusan Izin Olah Gerak Kapal bisa berjalan dengan baik dan efektif untuk mengurangi hambatan yang terjadi dalam proses penerbitan maka kerja sama antara pihak operasional dan pihak kapal perlu ditingkatkan sehingga dalam pengurusan izin olah gerak kapal berjalan lebih baik dan tepat waktu.

DAFTAR REFERENSI

- Arditiya, dkk. 2023. Prosedur Pengajuan Nota Dinas Sebagai Penundaan Waktu *Docking* Pada Kapal LCT Total I di PT Agus Suta Line. *Jurnal Maritim*. 13(2), 29-33.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>. [Diakses 10 Agustus 2024].
- Kesuma, N., hani Sabila, F., & Chrisnatalanta, C. (2022). SISTEM PENGURUSAN SIGN ON BUKU PELAUT CREW KAPAL DI KANTOR KSOP KHUSUS BATAM PADA PT. PUTRA ANAMBAS SHIPPING BATAM. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 411-416.
- Mahendra, J & Saputro, S. Analisis Penetapan Daerah Lingkungan Kerja Sebagai Daerah Labuh Kapal Pada Pelabuhan Tanjung Priok. *Prosiding Seminar Intelektual Muda Universitas Trisakti*. 572-582. 2021.
- Prasetiawan, F. T., Ismail & Sinaulan, R.L. Kepastian Hukum Atas Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Perairan Pedalaman Pada Pengoperasian Kapal Laut. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. 1(11), 2799-2805. 2022.
- Sabila, F. H., & Bancin, S. B. (2024). PROSES BONGKAR MUAT CONTAINER DI DEPO OLEH PT PRIMA INDONESIA LOGISTIK BELAWAN. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 6(1), 55-61.
- Sabila, F. H., & Rakawitan, F. (2023). Persiapan Peralatan dan Dokumen Sebelum Melaksanakan Aktivitas Bongkar Curah Kering pada PT Wahana Intradermaga Niaga Belawan. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 509-519.
- Sabila, F. H., Danilwan, Y., & Rafli, M. (2024). ANALISIS KETERSEDIAAN FASILITAS BONGKAR MUAT TERHADAP PELAYANAN DI KAPAL KM KELUD PADA PT PELNI (PERSERO) CABANG MEDAN. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 6(2).
- Sandy, A.P., Satriyo, G & Estiari, N.R. Implementasi Kegiatan Claerance In Dan Clearance Out Kapal UV. Royal King Ali Pada PT. Bahtera Adhiguna Cabang Banyuwangi. *Discovery: Jurnal Kemaritiman dan Transportasi*. 3(2), 84-95. 2021
- Saputra, S. B., Zakki, A, F & Trimulyono, A. Analisis Kekuatan Konstruksi *Graving Dock* Gate Pada *Dry Dock* 8000 DWT. *Jurnal Teknik Perkapalan*. 8(4), 491-500. 2021
- Satria, Y, Dirhamsyah & Jufriyanto. Peranan Bagian Operasional Dalam Mengurus Izin Olah Gerak Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Pada PT. Naval Global Trans Cabang Belawan. *Journal of Maritime and Education*. 4(2), 386-393. 2022.
- Situmorang, E. (2024). Proses Penerbitan Dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) pada PT. Pelayaran Dwi Putra Laksana Batam. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2(2), 289-296.
- Subar, M.A., Djamaan, A & Muhayyang, M. Analisis Pengaruh Angin dan Arus Terhadap Olah Gerak MT. Gandini Saat Akan Sandar Di Pelabuhan Pertamina Balikpapan. *Jurnal Venus*. 8(2), 21-29. 2020.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Widyaningrum, N & Widianti, Nurita. Studi Deskriptif Penerapan Inaportnet Dalam Pelayanan Konsumen di Perusahaan Keagenan Kapal. *Jurnal Maritim Polimarin*. 6(2), 54-57. 2020.